



Sisir Perairan Anak Krakatau, Cari 5 Jurnalis yang Hilang

Sisir Perairan Anak Krakatau, Cari 5 Jurnalis yang Hilang Tim SAR gabungan memperluas pencarian pada hari kedua untuk menemukan 8 penumpang--5 diantaranya jurnalis-- yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Rabu (9/9/2026). Operasi pencarian kini dibagi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU) agar jangkauan penyisiran lebih luas. Empat SRU mengerahkan sejumlah armada. KN SAR Tetuka 247 menyisir hingga 68,3 nautical mile (NM), KAL Anyer 69,5 NM, dan RIB 01 Lampung sejauh 67 NM. Sementara RIB 02 Banten difokuskan menyisir perairan di sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Berita lengkap baca Hal.12. (ist.antara)

RAKYAT BERHAK MENOLAK MBG

Terbaru 231 Siswa di Pati Keracunan, Se-Indonesia 2.000 Lebih Korban dalam Sepekan

Lebih dari 2.000 orang, sebagian besar anak-anak, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 1-9 September 2026. Kasusnya tersebar di Sidoarjo, Rembang, Agam, Tana Toraja, hingga yang terbaru di Pati. Makanan yang semestinya ditunggu anak-anak kini justru membuat sebagian takut makan. Di SMPN 1 Kabuh, Jombang, ratusan porsi MBG dibiarkan utuh karena siswa ragu menyantapnya. Di SMAN 1 Lasem, Rembang, sebagian korban memilih membawa bekal dari rumah. Di Sidoarjo, 45 santri Mambaul Hikam kembali dilarikan ke rumah sakit setelah sebelumnya sempat menjalani rawat jalan. Kasus yang lebih membuat wawas terjadi di Karo, Sumatra Utara. Febiona Purba, 16 tahun, dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah dugaan keracunan MBG pada 13 Agustus. Rangkaian kasus itu menyisakan persoalan yang lebih besar daripada sekadar keamanan makanan yaitu kepercayaan. Ombudsman Jawa Tengah pun menegaskan bila rakyat berhak menolak MBG. BACA HAL 11...

RENTAN
KASUS BESAR MBG
(SEP 2026)

Rembang, Jawa Tengah

777 orang

Terjadi di SMAN 1 Lasem, terdiri dari 752 siswa dan 25 guru. Gejala muncul 3 September setelah mengonsumsi MBG sehari sebelumnya. Kasus masih diperiksa dan SPPG Soditan Lasem dihentikan sementara.

Pati, Jawa Tengah

231 orang

Kasus 9 September di Kecamatan Gembong melibatkan 127 siswa MTsN 3 Pati, 103 SMPN 1 Gembong, dan 1 MTs Mambaul Ulum. Gejala berupa mual, pusing, muntah, dan diare. Sampel makanan telah dikirim untuk pemeriksaan laboratorium.

Sidoarjo, Jawa Timur

730 orang

Terjadi setelah konsumsi MBG pada 1 September. Per 3 September, tercatat 730 siswa dan santri terdampak: 23 rawat inap, 706 rawat jalan, dan 1 observasi. Pada 7 September, 45 santri kembali dilarikan ke rumah sakit.

Agam, Sumatra Barat

334 orang

Kasus di Kecamatan Palupuh melibatkan 334 siswa dan guru dari sejumlah sekolah di tiga nagari. Mereka mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Penyebab masih diperiksa.

Sumber:
 Berbagai Sumber Diolah

BONUS EMAS ASIAN GAMES RP3 MILIAR, PRABOWO: KITA JANGAN PELIT

Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan bonus Rp3 miliar bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas. Nilai bonus tersebut tiga kali lipat dibandingkan bonus emas pada SEA Games.

REKAM JEJAK PRESTASI DI ASIAN GAMES

Asian Games 2022 (Digelar 2023)

- Tuan Rumah: Hangzhou, China
- Peringkat Akhir: 13
- Perolehan Medali: 7 Emas, 11 Perak

Asian Games 2018

- Tuan Rumah: Jakarta-Palembang, Indonesia
- Peringkat Akhir: 4
- Perolehan Medali: 31 Emas, 24 Perak

Asian Games 2014

- Tuan Rumah: Incheon, Korea Selatan
- Peringkat Akhir: 17
- Perolehan Medali: 4 Emas, 5 Perak

Asian Games 2010

- Tuan Rumah: Guangzhou, China
- Peringkat Akhir: 15
- Perolehan Medali: 4 Emas, 9 Perak

Asian Games 2006

- Tuan Rumah: Doha, Qatar
- Peringkat Akhir: 22
- Perolehan Medali: 2 Emas, 3 Perak



Sejumlah atlet dan ofisial Indonesia mengikuti acara Pengukuhan Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (9/9/2026). (ant)

memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta. Ini kehormatan yang sangat besar," ujar Prabowo.

Meski jumlah akhirnya menjadi 430 atlet, Prabowo tetap menggunakan angka 432 ketika menggambarkan proses kualifikasi kontingen. Dua atlet tidak berangkat karena kondisi kesehatan. Sebagian atlet lainnya juga sudah berada di luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan atau persiapan pertandingan. Dari keseluruhan kontingen, sekitar 281 atlet hadir langsung dalam seremoni pelepasan di Istana.

Prabowo kemudian meminta para atlet tidak menganggap Asian Games sekadar kompetisi olahraga. Ia menilai keberadaan mereka di arena pertandingan merupakan representasi Indonesia di tingkat Asia. Bahkan, ia membandingkan kehormatan tersebut dengan perjalanan kariernya sendiri sebagai presiden dan mantan prajurit.

"Saya sekarang Presiden Republik Indonesia, saya di tentara dapat pangkat yang tertinggi. Tapi saya sebetulnya dalam hati saya, saya belum bisa seperti kalian ini mewakili bangsa," katanya.

Presiden juga mengingatkan bahwa prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Ia mengutip prinsip seorang pelatih Olimpiade mengenai tiga hal yang menentukan keberhasilan seorang atlet.

"Rumus untuk jadi champion itu hanya tiga, latihan, latihan, latihan," ujar Prabowo.

Selain menjanjikan bonus untuk peraih emas, pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap keberlanjutan karier atlet berprestasi. Perhatian itu tidak hanya diberikan kepada peraih emas, tetapi juga atlet yang mendapatkan medali perak dan

perunggu.

"Yang kemarin medali perak, medali perunggu pun, karier-karier kita semua percepat," kata Prabowo.

Kebijakan tersebut juga diarahkan kepada atlet yang berasal dari institusi TNI dan Polri. Prabowo mencontohkan personel kepolisian yang kariernya mendapatkan perhatian setelah menorehkan prestasi di bidang olahraga. Menurut dia, penghargaan terhadap atlet merupakan bagian dari upaya negara mengapresiasi pengorbanan mereka.

"Kita jangan pelit. Kalau baik kita memberi penghormatan," ujar Prabowo.

Bonus Rp3 miliar itu sekaligus menjadi salah satu bentuk insentif pemerintah kepada atlet yang akan menghadapi persaingan ketat di Asian Games Aichi-Nagoya. Sebelumnya, pemerintah memberikan bonus Rp1 miliar bagi peraih emas SEA Games 2025.

Di hadapan kontingen, Prabowo menutup pesannya dengan meminta para atlet menjaga daya juang selama bertanding. Ia meminta mereka tampil maksimal dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan atlet dari negaralain.

"Selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa, selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu," kata Prabowo.

Target 4 Emas

Indonesia memasang target realistis empat medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Target itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir usai pengukuhan Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Serbaguna,

Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). "Jika melihat situasi saat ini secara realistis, target kita untuk hari ini memang adalah empat medali emas," kata Erick.

Target tersebut lebih rendah dibanding capaian Indonesia pada Asian Games Hangzhou 2022 yang meraih tujuh medali emas. Meski demikian, Erick mengatakan pemerintah mengubah strategi pembinaan agar persiapan menuju kompetisi lebih terarah. Pelatnas kini tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah cabang olahraga, tetapi dikerucutkan berdasarkan cabang dan atlet yang dinilai memiliki peluang prestasi.

Erick menyebut bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi sejumlah cabang olahraga andalan Indonesia untuk mendulang medali. "Serupa dengan Olimpiade, fokus kita tetap pada cabang olahraga andalan seperti bulu tangkis, panjat tebing, serta angkat besi. Oleh sebab itu, formula pelatnas saat ini disesuaikan agar lebih mengerucut pada sasaran yang jelas dan atlet yang terpilih," ujarnya.

Selain tiga cabang tersebut, pemerintah mulai memusatkan pembinaan pada 21 cabang olahraga unggulan. Sebanyak 20 di antaranya merupakan cabang yang dipertandingkan di Olimpiade. Satu cabang lainnya adalah pencak silat yang didorong sebagai cabang olahraga prestasi sekaligus bagian dari identitas budaya Indonesia.

Erick ingin pencak silat memiliki posisi yang kuat seperti taekwondo di Korea Selatan, judo di Jepang, dan muay thai di Thailand. "Kalau misalnya Korea bisa dengan taekwondo-nya, Jepang bisa dengan judonya, Thailand bisa dengan muay thai-nya, kenapa Indonesia tidak bisa dengan pencak silatnya?" kata Erick. Asian Games 2026 pun menjadi salah satu panggung bagi Indonesia untuk menguji efektivitas strategi pembinaan tersebut.

Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 terdiri atas 430 atlet dan 145 ofisial dari 35 cabang olahraga. Jumlah itu berkurang dari 432 atlet yang sebelumnya dinyatakan lolos karena dua atlet tidak dapat berangkat akibat sakit. Di tengah target empat emas tersebut, Indonesia akan berupaya mempertahankan tradisi prestasi sekaligus membuktikan apakah strategi pelatnas yang lebih terfokus mampu menghasilkan capaian yang lebih efektif di arena Asia. (tin,rls,ant/dya)



JEJAK POLITIK ALDI TAHER, KINI MASUK DEMOKRAT

Aldi Taher kembali berganti kendaraan politik. Artis sekaligus presenter itu kini dipastikan bergabung dengan Partai Demokrat, setelah sebelumnya pernah berkiprah bersama sejumlah partai, mulai dari PKS, PBB, hingga Perindo. Aldi disebut akan menjadi salah satu kader baru Demokrat bersama sejumlah figur muda dari kalangan influencer, kreator konten, dan praktisi investasi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membenarkan kabar tersebut. "Betul," kata Herman saat dikonfirmasi, dikutip, Rabu (9/9/2026).

Aldi sebenarnya dijadwalkan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat dalam agenda penyerahan kepada sejumlah figur muda di kantor DPP Demokrat, Senin (7/9/2026). Namun, ia tidak hadir karena sedang dalam perjalanan ke Bandung.

"Aldi Taher yang kemarin berhalangan hadir karena perjalanan ke Bandung," ujar Herman.

Ketika ditanya apakah Aldi sudah resmi menjadi kader, Herman menyebut masih ada penyesuaian agenda untuk penyerahan KTA.

"Ada perubahan jadwal," katanya.

"Ya tinggal menunggu kesesuaian waktu," lanjut Herman.

Sementara itu, sejumlah figur muda lainnya sudah menerima KTA secara langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta pada Senin (7/9/2026). Mereka antara lain investor saham sekaligus pendiri Stockwise Andry Hakim, serta Andrian Wijaya, Seiya Kawakami, Vincent Liyanto, Daniel Wiguna, dan Adhitya Chandra.

Foto penyerahan KTA menunjukkan para kader baru tersebut mengenakan kemeja biru khas Demokrat beserta name tag masing-masing. Herman menyebut Demokrat sebagai partai terbuka yang memberikan "karpet biru" kepada siapa pun, terutama tokoh dan influencer yang ingin terlibat dalam politik.

"Terima kasih Demokrat menjadi

tempat yang tepat untuk berkiprah di dunia politik," kata Herman.

Bagi Aldi Taher, Demokrat bukan persinggahan pertama dalam perjalanan politiknya. Nama Aldi mulai muncul dalam politik elektoral menjelang Pilkada Serentak 2020.

Ia pernah mengikuti penjurangan bakal calon Wakil Gubernur Sumatra Barat melalui PKS. Namanya juga sempat dikaitkan dengan Pilkada Sulawesi Tengah untuk mendampingi Rusli Baco Dg Palabbi. Namun, kedua rencana tersebut tidak berlanjut hingga tahap pencalonan resmi.

Aldi kemudian bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Di partai yang saat itu dipimpin Yusril Ihza Mahendra tersebut, ia pernah dipercaya menjadi Ketua DPP Relawan Sahabat Aldi Taher dan disiapkan sebagai bakal calon legislatif.

Pada Pemilu 2024, perjalanan politik Aldi kembali menjadi sorotan setelah namanya tercatat sebagai bakal calon legislatif dari dua partai berbeda. Ia terdaftar sebagai bacaleg DPRD DKI Jakarta dari PBB dan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo.

Pencalonan ganda tersebut kemudian menjadi persoalan dalam proses verifikasi KPU. Aldi pada akhirnya maju sebagai calon anggota DPR RI melalui Perindo untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII.

Hasilnya belum cukup untuk mengantarkannya ke Senayan. Berdasarkan data KPU, Aldi memperoleh 6.798 suara di Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Partai Perindo secara keseluruhan memperoleh 33.666 suara

di dapil tersebut.

Perolehan tersebut juga tidak mampu mengantarkan Perindo melewati ambang batas parlemen secara nasional. Aldi pun gagal menjadi anggota DPR RI.

Keputusan Aldi bergabung dengan Demokrat sebenarnya bukan sepenuhnya kejutan. Sinyal itu sudah muncul beberapa bulan sebelumnya.

Pada Mei 2026, Aldi bertemu AHY dalam sebuah acara yang juga dihadiri motivator Merry Riana. Dalam pertemuan tersebut, Aldi secara spontan menyatakan dirinya menjadi bagian dari Demokrat.

"Bismillahirrahmanirrahim Aldi Taher jadi anggota Demokrat! Semua Demokrat milik Allah!" seru Aldi dalam video pertemuan tersebut.

Menyasar Pemilih Muda

Masuknya Aldi dan sejumlah influencer ke Demokrat berlangsung di tengah rangkaian peringatan HUT ke-25 partai tersebut. Perekrutan figur dari luar struktur politik konvensional ini bukan tanpa alasan.

AHY mengatakan Demokrat ingin memperluas jangkauan kepada berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda. Ia menyebut komposisi pemilih milenial dan Generasi Z pada Pemilu 2024 telah mencapai sekitar 56 persen.

"Sebetulnya kami ingin terus menyapa berbagai kalangan, berbagai komunitas, termasuk generasi muda Indonesia yang jumlahnya semakin besar, bahkan akan mendominasi," ujar AHY usai menghadiri Pembukaan Bimtek Nasional Fraksi DPRD

Partai Demokrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

AHY memperkirakan proporsi pemilih muda akan semakin besar pada Pemilu 2029.

"Tadi saya juga memaparkan kepada para anggota DPRD bahwa Pemilu 2024 yang lalu saja komposisi generasi milenial dan generasi Z itu sudah 56% kurang lebih. Sedangkan 2029 akan semakin besar lagi," katanya.

AHY juga mengatakan generasi muda tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek politik menjelang pemilu. Menurut dia, partai perlu memahami karakteristik dan aspirasi kelompok tersebut sekaligus melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Dalam kerangka itu, influencer dinilai memiliki posisi strategis karena dapat menyebarkan pandangan, gagasan, dan membangun kedekatan dengan komunitas.

"Influencer salah satu bagian dari demokrasi karena dalam urusan menyebarkan pandangan, gagasan, termasuk juga membangun kebersamaan itu dibutuhkan tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar juga, atau key opinion leaders, termasuk influencer," ujar AHY.

Partai NasDem meminta seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan menjaga soliditas dan stabilitas politik. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Saan mengatakan NasDem menghormati pernyataan tersebut sebagai sikap politik Demokrat, tetapi mengingatkan agar dinamika antarpolitical tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (gus,ist,kum/dya)



**Aldi
Taher**

POLDA METRO GELEDAH BPN BOGOR, DALAMI DUGAAN MAFIA TANAH PTSL 2019

BOGOR — Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I didatangi penyidik Subdirektorat Harta dan Benda (Subdit Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu (9/9/2026). Polisi datang bukan untuk pemeriksaan administratif biasa, melainkan melakukan pengeledahan terkait penyidikan dugaan mafia tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap terlihat berada di sekitar kantor pertanahan sejak pagi. Berdasarkan laporan awal dari lokasi, aparat mulai berjaga sekitar pukul 09.00 WIB. Pengeledahan kemudian dikonfirmasi Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses PTSL 2019.

Namun, pengeledahan itu ternyata tidak hanya berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Penyidik menasar tiga lokasi di Kabupaten Bogor. Dua lokasi lainnya berada di wilayah Cibinong dan Bojonggede. Kasubdit Harda



Polisi bersenjata lengkap di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Rabu (9/9/2026). (Ist)

Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP DK Zendrato mengatakan ketiga lokasi tersebut berkaitan dengan perkara yang sama.

"Pengeledahan di tiga lokasi ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan mafia tanah terkait PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede," kata Zendrato.

Pengeledahan dipimpin langsung oleh Zendrato. Penyidik membawa

serta sejumlah barang yang dianggap berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan tidak hanya berupa dokumen pertanahan, tetapi juga perangkat elektronik yang dapat membantu polisi menelusuri proses administrasi maupun jejak pembuatan dokumen.

"Barang bukti yang kita amankan berupa dokumen fisik, kemudian juga ada dokumen elektronik, terus

perangkat mesin tik dan komputer, dan barang bukti lainnya," ujar Zendrato.

Dilaporkan barang bukti yang diamankan antara lain dokumen pertanahan, perangkat elektronik, printer, dan mesin tik. Polisi belum merinci satu per satu dokumen yang disita maupun bagaimana setiap barang tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dalam proses PTSL. Kasus ini telah berjalan cukup lama. Penyidikan disebut dimulai sejak Desember 2025. Dalam rentang hampir sembilan bulan, penyidik Subdit Harda telah meminta keterangan dari hampir 50 orang. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya polisi memetakan bagaimana proses penerbitan dokumen PTSL berlangsung dan siapa saja yang diduga terlibat.

"Penyidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang," kata Zendrato.

Jumlah sertifikat dalam perkara ini juga cukup besar jika dilihat dari skala programnya. Pada 2019, program PTSL di Kecamatan Bojonggede mencakup sekitar 10 ribu sertifikat. Akan tetapi, polisi menegaskan bahwa angka tersebut bukan jumlah sertifikat yang dinyatakan palsu. (tin,rls,ant/dya)

MUARA ENIM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Rabu (9/9/2026). Kali ini, penyidik menasar dua titik yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa: Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang (PUPR) Muara Enim.

Pengeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tim KPK datang dengan pengawalan aparat kepolisian dan membagi penyidik menjadi dua kelompok. Satu tim bergerak ke ruang ULP Sekretariat Daerah, sementara tim lainnya menuju Kantor Dinas PUPR Muara Enim. Hingga sore hari, proses pengeledahan masih berlangsung.

Kedatangan penyidik mulai terlihat sekitar pukul 09.44 WIB. Belasan penyidik KPK tiba di lingkungan Pemkab Muara Enim menggunakan tiga mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam. Mereka mendapat pengawalan kendaraan patroli dari Polres Muara Enim.

Tim yang menuju ruang ULP kemudian masuk ke bagian yang berkaitan dengan pengadaan barang

KPK GELEDAH ULP DAN PUPR MUARA ENIM, 3 KOPER DAN 2 TAS DIBAWA PENYIDIK

dan jasa. Penyidik disebut didampingi Sekretaris Daerah Muara Enim Yulius ketika memasuki ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian, sebagian penyidik bergerak ke Kantor Dinas PUPR yang berada di kawasan perkantoran Islamic Center.

Di Kantor Dinas PUPR, proses pengeledahan berlangsung lebih lama. Media lokal melaporkan penyidik berada di lokasi sekitar tujuh jam. Setelah pengeledahan selesai, penyidik terlihat membawa dua koper dan satu tas keluar dari kantor tersebut.

Dengan demikian, total barang bawaan yang terlihat setelah pengeledahan adalah tiga koper dan dua tas. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi mengenai isi koper dan tas tersebut. Belum diketahui pula apakah seluruhnya berisi dokumen, perangkat elektronik, atau barang bukti lain.

Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang membenarkan adanya kegiatan tersebut. Polisi, kata dia, menerima permintaan pengamanan dari KPK selama proses pengeledahan.



Tim KPK kembali melakukan pengeledahan di Pemkab Muara Enim.ist

"Iya benar, ada tim KPK datang ke Muara Enim dan melakukan pengeledahan di dua tempat tersebut," kata Situmorang.

Menurut Situmorang, kepolisian menerjunkan delapan personel untuk mengamankan dua lokasi. Empat personel ditempatkan di Kantor Dinas PUPR dan empat lainnya di ULP Sekretariat Daerah.

"Dari kepolisian ada empat orang yang diterjunkan, dari Satuan Sabhara

untuk di PUPR dan empat orang di ULPSetda," ujarnya.

Sampai pengeledahan berlangsung, KPK belum menjelaskan secara resmi perkara spesifik yang menjadi dasar tindakan penyidik di dua kantor tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi mengenai pengeledahan itu juga belum memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang didalami. (tin,ant,dtc/dya)

MALAYSIA PROTES ASAP, RI DIDESAK BUKA IDENTITAS KORPORASI TERLIBAT KARHUTLA

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi persoalan lintas batas. Di Malaysia, protes terhadap asap yang menyelimuti sejumlah wilayah bukan hanya datang dari warga yang terdampak, tetapi juga dari kelompok lingkungan yang menuntut pemerintah Indonesia membuka informasi mengenai perusahaan pemegang konsesi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Pada Jumat (4/9/2026), belasan aktivis Greenpeace Malaysia dan Himpunan Advokasi Rakyat (HARAM) menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Mereka membawa poster dan spanduk serta berorasi secara bergantian.

Para aktivis meminta pemerintah Indonesia membuka identitas perusahaan-perusahaan pemegang konsesi lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka secara khusus meminta pemerintah Indonesia membuktikan dugaan keterlibatan perusahaan perkebunan yang dimiliki pihak Malaysia maupun Singapura.

"Kami menyampaikan seruan ini atas nama jutaan warga Malaysia yang kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan sehari-harinya terdampak setiap tahun oleh polusi asap lintas batas yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan di Indonesia," demikian pernyataan Greenpeace Malaysia yang diterima Rabu (9/9/2026).

Campaign manager Greenpeace Malaysia Heng Kiah Chun dan chairman Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM) Brendon Gan mengatakan pengakuan mengenai adanya persoalan lintas batas harus diikuti dengan bukti yang dapat diperiksa publik. Menurut mereka, pernyataan tanpa pembukaan data hanya membuat masyarakat kesulitan meminta pertanggungjawaban pihak yang dianggap bertanggung jawab.

"Kami menyambut pengakuan tersebut sebagai titik awal menuju akuntabilitas lintas batas yang sesungguhnya," ujar Heng Kiah Chun dan Brendon Gan.

Namun, mereka menilai



Kawasan Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah hingga Rabu (9/9/2026) masih dilanda kebakaran. Petugas dengan kostum unik spiderman ikut memadamkan api. (ist)

pengakuan tanpa bukti yang diungkapkan kepada publik tidak membuat masyarakat di kedua negara memiliki kemampuan lebih baik untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, mereka meminta pemerintah Indonesia membagikan bukti mengenai perusahaan atau pemegang konsesi yang berkaitan dengan karhutla kepada Pemerintah Malaysia. Mekanismenya dapat ditempuh melalui Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), maupun melalui jalur bilateral.

"Alih-alih hanya menyampaikan melalui tuduhan publik dan pernyataan kepada media," kata keduanya.

Menurut Heng dan Brendon, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat sipil, regulator, dan parlemen Malaysia memiliki dasar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam yurisdiksinya.

"Sementara itu, masyarakat yang menanggung risiko kesehatan, beban ekonomi, dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka tetap tidak memperoleh pemulihan yang memadai," ujar mereka.

Tuntutan tersebut muncul ketika asap karhutla dari sejumlah wilayah Indonesia telah berdampak hingga negara tetangga. Di lapangan, persoalannya bukan lagi sekadar jarak pandang atau gangguan aktivitas. Warga di sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan mulai mengalami gangguan pernapasan, sementara kegiatan sekolah dan pekerjaan turut terganggu.

Kabut asap juga memaksa pemerintah daerah mengubah kegiatan belajar mengajar. Di Palembang, Wali Kota Ratu Dewa menerbitkan Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2026 yang mewajibkan siswa PAUD, TK, SD, dan SMP mengikuti pembelajaran jarak jauh mulai Rabu (9/9).

Kebijakan itu diambil ketika kualitas udara dinilai mengkhawatirkan dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kalangan pelajar disebut menunjukkan tren peningkatan.

"Penyesuaian jadwal ini merupakan langkah antisipasi agar kegiatan belajar tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa," kata Ratu Dewa, Selasa (8/9).

Kuala Lumpur Tawarkan Bantuan

Di tengah meningkatnya dampak lintas batas tersebut, pemerintah Malaysia mengambil langkah berbeda dari tekanan kelompok masyarakat

sipil. Kuala Lumpur menawarkan bantuan operasional kepada Indonesia untuk menangani karhutla.

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan Malaysia siap membantu apabila Indonesia membutuhkan dukungan. Tawaran itu mencakup pemadaman dari udara menggunakan helikopter water bombing, dukungan pesawat amfibi, serta operasi penyemaian awan.

"Malaysia siap memberikan bantuan jika diperlukan oleh Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas," kata Arthur dalam pernyataan pada Rabu (9/9/2026).

Kesiapan tersebut melibatkan sejumlah lembaga Malaysia, antara lain Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penegakan Maritim Malaysia, Departemen Meteorologi, serta Angkatan Udara Diraja Malaysia.

Arthur mengatakan dirinya telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat. Tawaran itu merupakan kelanjutan komunikasi bilateral yang sebelumnya berlangsung dalam pertemuan di Bali pada 8 Juli dan pembicaraan melalui telepon pada 24 Agustus.

Kedua negara sebelumnya telah sepakat memperkuat pencegahan dan pemadaman dini menghadapi risiko kabut asap lintas batas, terutama di tengah ancaman El Nino dan musim monsun barat daya yang meningkatkan potensi cuaca panas dan kering.

Namun bantuan Malaysia belum serta-merta dapat diterjunkan. Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara Pemerintah MADANI, Fahmi Fadzil, mengatakan Kuala Lumpur masih menunggu konfirmasi Indonesia.

"NADMA dan Wisma Putra menginformasikan kepada Kabinet bahwa daftar aset yang mampu kita sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan," kata Fahmi.

"Namun sampai sekarang belum ada konfirmasi mengenai bentuk kerja sama untuk menggunakan aset-aset dari Malaysia bagi membantu memadamkan kebakaran dan sebagainya," ujarnya. (tin,bbc,ist,rls/dya)

Sejumlah guru di beberapa kota di Pulau Sumatra mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring sejak Rabu (9/9/2026) karena asap karhutla. (ist)



Dilema Sekolah di Kabupaten Malang: Guru Kurang, tapi Rekrut Honorer Dilarang

MALANG- Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang menghadapi dilema dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Di satu sisi, sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan guru. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer karena terbentur regulasi pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, mengatakan Pemkab Malang saat ini berpegang pada aturan yang melarang kepala daerah mengangkat pegawai non-ASN. Salah satu dasar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah.

"Ada ketentuan larangan terkait dengan pengangkatan pegawai tidak tetap, honorer. Di aturan itu, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah, bupati atau wali kota dilarang mengangkat pegawai non-ASN," ujar Bagus, dikutip pada Rabu (9/9/2026).

Diakuinya, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah tetap ada.

Kekurangan guru membuat sejumlah sekolah kemudian merekrut tenaga pengajar secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.

Kondisi tersebut kemudian berimbas pada status administrasi para guru tidak tetap (GTT) yang direkrut sekolah. Sebanyak 2.025 GTT di Kabupaten Malang disebut belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan GTT tersebut tersebar di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Rinciannya terdiri atas 11 guru PAUD, 1.651 guru SD, dan 363 guru SMP.

Namun Bagus menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang. Menurutnya, kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, termasuk Kota Malang dan Kota Batu. "Sejak 2021 itu rata-rata sudah tidak memasukkan guru GTT dan PTT ke Dapodik," katanya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tetap mengapresiasi keberadaan GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) yang selama

ini membantu pelayanan pendidikan.

Menurut Bagus, keberadaan GTT turut membantu sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar, terutama ketika jumlah guru yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.

Pemkab Malang, lanjut Bagus, telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang untuk mencari jalan keluar persoalan tersebut.

"Kami juga sudah bersurat ke Pak Bupati, turun ke BKPSDM, BKPSDM bersurat ke KemenPAN. Konsultasi terkait dengan teman-teman GTT tadi itu," pungkas Bagus.

Persoalan ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismanto,



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan. (foto: Prokopim Kab. Malang)

yang menilai pencatatan guru dalam Dapodik tidak semestinya disamakan dengan pengangkatan sebagai pegawai Pemkab Malang.

Menurutnya, Dapodik merupakan pendataan tenaga pendidik dan tidak secara otomatis mengubah status seorang guru menjadi pegawai pemerintah. (Santi/Dya)

Beras Premium Langka, Diskopindag Kota Malang Siapkan Intervensi



Ilustrasi: Pedagang sembako di Pasar Klojen, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menyiapkan intervensi untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras premium di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan setelah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menemukan adanya penurunan pasokan beras premium dalam

pemantauan di lapangan yang dilakukan Selasa (8/9/2026).

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi pasokan beras premium secara menyeluruh. Pengecekan akan dilakukan mulai dari gudang hingga tingkat produsen.

"Kami akan cek lebih lanjut ke gudang, produsen, kemudian kami laporkan ke pimpinan (Wali Kota) apakah perlu dan seperti apa adanya intervensi pemerintah untuk memenuhi pasokan beras premium ini," ujar Eko, ditemui di kantor DPRD Kota Malang, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, bentuk intervensi nantinya akan menyesuaikan arahan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyaluran pasokan dapat dilakukan

melalui Perum Bulog maupun dinas terkait.

"Biasanya akan ada arahan dari Bapanas yang apakah itu nanti menyalurkan ke Bulog atau dinas langsung. Kalau dinas biasanya akan melalui Dispangtan. Kami hanya memantau perkembangan beras yang ada di pasar," jelasnya.

Eko menjelaskan, dari hasil pemantauan sementara, berkurangnya pasokan beras premium salah satunya dipengaruhi tingginya harga dari tingkat distributor. Kondisi tersebut membuat pedagang di pasar berada pada pilihan untuk tetap mengambil stok dengan konsekuensi menaikkan harga jual atau tidak mengambilnya.

"Sehingga pedagang juga mikir-mikir, tetap mengambil dengan konsekuensi menjual harga yang lebih tinggi juga atau tidak mengambil," katanya.

Di sisi lain, menurut Eko, kebutuhan masyarakat di Kota Malang terhadap beras premium masih tergolong tinggi. Disebutkannya, Diskopindag masih

menemukan masyarakat yang mencari beras premium meski harganya mengalami kenaikan.

Lebih lanjut, Eko menyebut kondisi pasokan beras premium saat ini juga tidak terlepas dari siklus produksi pertanian. Menurutnya, saat ini masih berada pada musim tanam sehingga belum memasuki masa panen yang dapat menambah pasokan beras.

Disinggung terkait potensi adanya penimbunan beras premium oleh oknum tertentu, Eko menegaskan, Diskopindag belum dapat memastikan adanya indikasi permainan pasar yang menyebabkan pasokan beras premium menipis.

Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan langsung sekaligus memitigasi kemungkinan adanya persoalan dalam rantai distribusi. "Saya belum bisa memastikan ke arah sana. Tetapi kami selalu bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk turun ke lapangan memitigasi dan memastikan isu tersebut," tegas Eko. (Santi/Dya)



INGGRIS-ISRAEL

BERBALAS SANKSI SOAL PALESTINA

Tensi Inggris dan Israel meningkat setelah London menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat. Tel Aviv membalas dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan melarang sejumlah warga Inggris masuk Israel.

Hubungan Inggris dan Israel memasuki fase baru yang lebih tegang. Pemerintah Inggris mengumumkan serangkaian sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, sementara Israel merespons dengan langkah diplomatik terhadap London.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari "pendekatan baru" pemerintah Inggris terhadap konflik Israel-Palestina. Menurut dia, London tidak lagi cukup hanya mengecam kekerasan dan penderitaan warga Palestina, tetapi harus mengambil tindakan.

"Kita tidak hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan tetapi juga bertindak," kata Miliband dalam pernyataannya kepada parlemen Inggris, seperti diberitakan BBC News dikutip Rabu (9/9/2026).

Inggris antara lain akan melarang masuknya barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat. London juga menyiapkan langkah terhadap perusahaan maupun individu yang menyediakan layanan, mendukung, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari ekspansi permukiman tersebut.

Pemerintah Inggris menyatakan rezim sanksi yang lebih komprehensif akan diperkenalkan dalam enam hingga sembilan bulan ke depan.

Miliband bahkan menggunakan istilah yang jauh lebih keras. Ia mengatakan pemerintah Inggris berpandangan bahwa telah terjadi "pembersihan etnis" terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi

Barat yang dilakukan oleh pemukim Israel.

"Pemerintah UK setuju bahwa telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah-wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim," ujar Miliband.

Ia menuduh pemerintah Israel terlalu sering menutup mata terhadap kekerasan tersebut. Bahkan, menurutnya, terdapat pejabat Israel yang mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang mendukung pemindahan paksa warga Palestina.

Namun London menegaskan sasaran kebijakan tersebut bukan masyarakat Israel. Miliband menyebut sanksi diarahkan kepada aktivitas permukiman dan perluasannya.

"Rezim sanksi ini akan menargetkan permukiman ilegal dan perluasan permukiman, bukan Israel," katanya.

12 Negara Tekan Israel

Inggris tidak bergerak sendirian. Bersama 11 negara lain, yakni Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia, London menyatakan akan memperkenalkan atau mendukung pembatasan perdagangan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat.

Dalam pernyataan bersama, ke-12 negara mengatakan ekspansi permukiman dan meningkatnya kekerasan pemukim telah semakin merusak kemungkinan terbentuknya negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Mereka juga menolak tindakan yang dinilai mengarah pada pencaplokan wilayah Palestina dan pemindahan paksa penduduk Palestina.

Pemerintah Inggris menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka mempertahankan solusi dua negara. London menilai perluasan permukiman akan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.

Langkah itu juga menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Inggris. Pemerintah Inggris kini secara terbuka menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina tidak sah dan menyebut permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional. Parlemen Inggris sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa permukiman tersebut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Salah satu pemicu terbaru ketegangan adalah rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, wilayah strategis di sebelah timur Yerusalem.

Israel membuka tender pembangunan sekitar 1.200 rumah di kawasan tersebut. Rencana pembangunan E1 telah lama menjadi persoalan internasional karena kawasan itu berada di antara Yerusalem dan bagian tengah Tepi Barat.

Miliband menilai pembangunan tersebut berpotensi membelah wilayah Palestina dan membuat solusi dua negara semakin sulit diwujudkan.

Proyek E1 sendiri telah tertunda selama bertahun-tahun akibat tekanan internasional. Karena itu, keputusan Israel untuk kembali membuka tender pembangunan di kawasan tersebut dipandang sebagai perkembangan penting dalam politik permukiman Israel.

Persoalan permukiman bukan isu baru. Israel telah membangun sekitar 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dihuni sekitar 700.000 warga Yahudi. Di wilayah yang sama hidup sekitar 3,3 juta warga Palestina, menurut data yang dikutip BBC.

Sejak perang Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat juga meningkat.

Sanksi Inggris segera dibalas Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut tuduhan Miliband mengenai "pembersihan etnis" sebagai "kebohongan yang keterlaluan".

"Kami tahu bahwa kami memiliki banyak teman di UK. Sayangnya, kami menghadapi pemerintahan Partai Buruh yang bermusuhan yang secara konsisten bertindak melawan Negara Israel," kata Saar.

Menurutnya, pemerintah Inggris telah meninggalkan Israel tanpa pilihan selain memberikan respons.

Balasan Israel tidak berhenti pada kecaman diplomatik. Saar mengumumkan bahwa konsulat Inggris di Yerusalem Timur akan ditutup. Inggris juga dikeluarkan dari misi koordinasi yang dipimpin Amerika Serikat untuk Gaza, sementara pelatihan Inggris bagi pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat dihentikan. (gus,bbc,ist/dya)



ED MILIBAND
Menteri Luar Negeri Inggris

Abu Vulkanik Ancam Kesehatan

Lindungi Paru-paru, Mata dan Kulit

Enam gunung api di Indonesia tercatat berada dalam kondisi aktivitas tinggi, termasuk Gunung Anak Krakatau yang terus menjadi perhatian akibat erupsi dan sebaran abu vulkaniknya.. Abu vulkanik yang terbawa angin juga membawa risiko kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik, tetapi mengurangi paparan abu vulkanik dengan membatasi aktivitas di luar rumah. Imbauan itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram @bgsadikin.

"Kalau bisa tinggal di rumah saja, tidak usah keluar-keluar sehingga tidak ada udara kotor yang masuk ke pernapasan kita," kata Budi.

Jika harus keluar, masyarakat dianjurkan menggunakan masker, dengan KN95 sebagai pilihan yang diutamakan. Bila masker tidak tersedia, masyarakat diminta menggunakan masker yang ada. Dalam kondisi terpaksa keluar tanpa masker, hidung dan mulut setidaknya harus ditutup untuk mengurangi paparan abu.

Anjuran tersebut sejalan dengan panduan kesehatan internasional. U.S. Geological Survey (USGS) menyebut abu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk penyakit paru yang sudah ada, seperti asma dan bronkitis.

Karena itu, masyarakat dianjurkan menghindari paparan yang tidak perlu dan menggunakan pelindung pernapasan ketika berada di tengah abu.

Risiko Utama Paru-paru

Abu vulkanik terdiri dari partikel yang sangat kecil. Sebagian dapat terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Kementerian Kesehatan mencatat paparan abu dapat menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, produksi dahak, mengi, rasa berat di dada hingga sesak napas.

Risikonya lebih besar bagi orang yang memiliki asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), bronkitis kronis, penyakit paru lainnya maupun penyakit jantung.

USGS juga mencatat partikel abu yang sangat halus dapat masuk lebih dalam ke paru-paru. Pada paparan tinggi, bahkan orang sehat dapat mengalami batuk, iritasi dan rasa tidak nyaman di dada.

Karena itu, berada di dalam rumah ketika kondisi udara dipenuhi abu merupakan salah satu langkah perlindungan paling sederhana. Pintu dan jendela sebaiknya ditutup untuk mengurangi masuknya abu ke dalam rumah.

Mata Juga Rentan

Abu vulkanik tidak hanya masuk melalui pernapasan. Partikel halusnya dapat mengiritasi mata.

Kemenkes mencatat paparan abu dapat menyebabkan mata merah, perih, berair, gatal dan menimbulkan sensasi seperti ada benda asing. Pada kondisi tertentu, gesekan partikel abu bahkan dapat menyebabkan abrasi kornea. "Abu ini ada partikel-partikel kecilnya yang bisa membuat mata kita jadi terganggu," ujar Budi. Karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di

luar rumah dianjurkan menggunakan kacamata. Panduan USGS juga merekomendasikan penggunaan pelindung mata untuk mengurangi risiko partikel abu masuk ke mata.

Kulit Dapat Mengalami Iritasi

Kontak langsung dengan abu juga dapat berdampak pada kulit. Menurut Kemenkes, paparan abu dapat menyebabkan iritasi, kemerahan dan rasa gatal, serta memperburuk penyakit kulit yang sebelumnya sudah ada.

Kementerian Kesehatan bahkan telah menyiapkan dukungan medis untuk menghadapi dampak erupsi. Menteri Kesehatan menyebut pemerintah menyiapkan nebulizer, konsentrator oksigen, obat tetes mata dan salep kulit.

Jangan Sapu Abu Kering

Salah satu kesalahan yang perlu dihindari adalah langsung menyapu abu vulkanik yang menempel di rumah atau halaman dalam kondisi kering. Aktivitas menyapu dapat membuat partikel abu kembali beterbangan dan kemudian terhirup. Budi menyarankan abu yang tipis terlebih dahulu dibasahi dengan sedikit air sebelum dibersihkan.

"Harus abunya disemprot dulu dengan air agar basah supaya abunya tidak terbang ke mana-mana saat kita bersihkan. Baru sesudah basah dan lembab, kita bersihkan," katanya.

Panduan USGS juga menekankan pentingnya mengurangi paparan ketika proses pembersihan berlangsung karena aktivitas manusia, kendaraan dan angin dapat membuat

abu yang telah mengendap kembali beterbangan.

Lindungi Air dan Makanan

Risiko abu vulkanik tidak berhenti pada udara. Kemenkes memperingatkan abu dapat mencemari sumber air terbuka, tempat penampungan air dan makanan yang tidak terlindungi.

Karena itu, wadah air sebaiknya ditutup dan makanan tidak dibiarkan terbuka selama abu masih berpotensi masuk ke lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebut abu dan bahan kimia hasil erupsi dapat mencemari makanan dan air serta mengganggu layanan dasar masyarakat.

Waspada Jalan Licin-Jarak Pandang

Abu vulkanik juga menciptakan risiko yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kesehatan pernapasan. Tumpukan abu dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan licin. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun cedera.

USGS menyarankan masyarakat menghindari perjalanan yang tidak penting ketika terjadi hujan abu. Jika harus berkendara, kendaraan perlu dipacu secara perlahan dengan jarak aman yang lebih besar.

Anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. USGS menyarankan kelompok tersebut menghindari paparan abu sebisa mungkin. (far,ist/dya)

Kurang Akurat, PBB Koreksi Peta Dunia

Persoalan tersebut kini kembali menjadi perhatian setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang mendorong penggunaan peta dunia dengan representasi luas wilayah yang lebih akurat. Resolusi yang dipimpin negara-negara Afrika itu memperoleh dukungan 164 negara, sementara enam negara abstain dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak.

Namun ada satu hal penting, PBB tidak secara hukum melarang peta Mercator atau secara resmi mengganti seluruh peta dunia. Resolusi tersebut bersifat tidak mengikat dan mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi internasional serta perusahaan teknologi mempertimbangkan proyeksi seperti Equal Earth untuk menggambarkan perbandingan luas wilayah secara lebih tepat.

Peta Mercator Bisa Menyesatkan

Peta Mercator diperkenalkan kartografer Gerardus Mercator pada 1569. Proyeksi tersebut dirancang terutama untuk membantu navigasi laut. Keunggulannya adalah arah kompas dapat direpresentasikan dengan sangat baik sehingga pelaut

dapat menggunakan garis tertentu untuk menentukan arah perjalanan.

Masalah muncul ketika proyeksi tersebut digunakan untuk menggambarkan ukuran seluruh benua. Semakin jauh suatu wilayah dari garis khatulistiwa, semakin besar distorsi ukurannya.

Efeknya mudah terlihat pada Greenland. Di peta Mercator, pulau terbesar di dunia itu tampak sebanding dengan Afrika. Padahal luas Afrika sekitar 14 kali Greenland.

Karena itu, persoalannya bukan bahwa peta Mercator "salah" secara keseluruhan. Peta tersebut sangat berguna untuk kebutuhan tertentu, khususnya navigasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika satu jenis proyeksi digunakan untuk membentuk persepsi masyarakat tentang perbandingan ukuran wilayah di seluruh dunia.

Equal Earth jadi Alternatif

Berbeda dari Mercator, Equal Earth merupakan proyeksi equal-area. Artinya, perbandingan luas wilayah pada peta dipertahankan agar sesuai dengan perbandingan luas sebenarnya di permukaan Bumi. Penelitian mengenai proyeksi ini menyebut Equal Earth dirancang

untuk mempertahankan ukuran relatif wilayah sekaligus menghasilkan bentuk benua yang tetap mudah dikenali.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan negaranya akan meninggalkan representasi Mercator dan menggunakan gambaran yang lebih mencerminkan luas permukaan sebenarnya.

"Amerika Serikat, Rusia, dan China mendapatkan penonjolan visual tidak proporsional dibanding Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara," katanya.

Bukan Sekadar Urusan Kartografi

Bagi negara-negara Afrika, perubahan tersebut memiliki makna lebih besar daripada sekadar mengganti desain peta.

Kampanye "Correct the Map" yang didukung Uni Afrika dan dipimpin Togo menilai distorsi selama ratusan tahun ikut membentuk cara masyarakat dunia melihat posisi Afrika. Dalam pandangan para pendukungnya, ketika sebuah wilayah secara konsisten terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya,

persepsi mengenai skala, kepentingan dan potensinya juga dapat ikut terpengaruh.

Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey menyebut hasil pemungutan suara tersebut sebagai momentum bersejarah. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan keadilan, martabat dan kesetaraan dalam cara dunia direpresentasikan.

Bagaimana dengan Google Maps?

Perubahan tersebut juga menarik karena peta kini tidak hanya ditemukan di atlas dan ruang kelas. Sebagian besar orang justru mengenal dunia melalui layar ponsel.

Google Maps, misalnya, masih menggunakan Web Mercator untuk sistem koordinat petanya. Dokumentasi resmi Google menjelaskan bahwa koordinat dunia pada Google Maps menggunakan proyeksi Mercator dan memotong tampilan sekitar lintang 85 derajat agar sistem petanya dapat bekerja dalam bentuk persegi.

Namun, perubahan itu tidak berarti Mercator akan tiba-tiba hilang dari semua aplikasi. Proyeksi tersebut masih memiliki fungsi teknis penting, terutama untuk navigasi dan pemetaan digital. (far,jst/dya)



Tampil Berlapis Tanpa Gerah dengan Fake Fashion Layer

Layering selama ini identik dengan tumpukan pakaian yang membuat penampilan lebih berdimensi. Namun, di tengah cuaca panas dan lembap, memakai beberapa lapis pakaian sekaligus bisa menjadi tantangan tersendiri.

Solusinya bukan selalu mengurangi gaya, melainkan memilih fake fashion layer yaitu aksesoris atau potongan pakaian yang menciptakan ilusi layering tanpa harus mengenakan satu set pakaian tambahan.

Tren ini sejalan dengan arah fesyen 2026 yang semakin menekankan pakaian serbaguna, ringan, dan mudah dipadupadankan. Sejumlah media fashion internasional juga menyoroti kebutuhan untuk tetap stylish sekaligus nyaman menghadapi suhu panas. Vogue, misalnya, mencatat bahwa gelombang panas membuat konsumen semakin memperhatikan pakaian yang breathable, sementara inovasi material dan desain mulai diarahkan untuk menghadirkan kenyamanan termal.

Secara ilmiah, pemilihan pakaian untuk cuaca panas memang tidak cukup hanya melihat jenis serat. Peneliti menilai konstruksi kain, bobot, ukuran pakaian, hingga kemampuan kain mengalirkan udara turut menentukan kenyamanan. George Havenith, profesor emeritus bidang environmental physiology and ergonomics dari Loughborough University, mengatakan hal terpenting adalah memastikan pakaian tidak menghambat proses penguapan keringat.

Karena itu, fake layer bisa menjadi alternatif menarik.

Alih-alih memakai kemeja lengkap di balik sweater, misalnya, cukup gunakan bagian kerah atau manset yang memang dirancang sebagai aksesoris.

Fake Collar

Fake collar atau kerah palsu menjadi salah satu cara paling sederhana untuk mengubah tampilan atasan polos. Potongan ini biasanya dikenakan di bagian leher sehingga memberikan ilusi seolah-olah pemakainya mengenakan kemeja atau blouse berlapis.

Untuk gaya formal dan rapi, model kerah kemeja klasik bisa dipadukan dengan sweater, cardigan atau dress sederhana. Sementara itu, model Peter Pan, lace, atau kerah dengan detail ruffle dapat memberikan kesan lebih feminin dan manis.

Keuntungannya, pengguna tidak perlu mengenakan kemeja secara utuh. Hanya bagian yang terlihat yang digunakan sehingga lapisan pakaian tetap minimal. Tren kerah yang sengaja ditonjolkan juga masih terlihat dalam fashion internasional.

Fake Hoodie

Ingin mendapatkan kesan streetwear tanpa benar-benar memakai hoodie lengkap? Fake hoodie bisa menjadi jawabannya. Item ini pada dasarnya hanya menghadirkan bagian hoodie yang dikenakan di belakang leher dan bahu. Ketika dipadukan

dengan kaus polos, tampilan seolah-olah menggunakan hoodie bertumpuk pun tercipta.

Cara ini juga bisa membantu memperpanjang variasi pakaian yang sudah ada di lemari. Kaus lama yang biasanya terlihat terlalu sederhana dapat diberi karakter baru hanya dengan menambahkan fake hoodie.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan wardrobe yang lebih efisien, bukan terus membeli pakaian baru, tetapi memaksimalkan kombinasi dari koleksi yang sudah dimiliki. Tren capsule wardrobe 2026 pun mengarah pada penggunaan sejumlah kecil pakaian yang dapat menghasilkan banyak kombinasi.

Dengan begitu, satu kaus dapat menghasilkan beberapa tampilan berbeda hanya dengan mengganti aksesoris dan elemen layering.

Shirt Extender

Bagi yang sering mengalami masalah atasan terlalu pendek, shirt extender dapat menjadi trik styling yang praktis.

Item ini biasanya berbentuk potongan kain yang dikenakan di bagian pinggang sehingga memberikan kesan seperti memakai inner atau kemeja panjang di balik atasan. Selain menciptakan efek layering, shirt extender juga dapat membuat tampilan lebih preppy dan rapi.

Bagi hijabers, item ini memiliki fungsi tambahan. Bagian belakang tubuh yang belum tertutup sempurna oleh atasan dapat disamarkan tanpa harus mengenakan inner panjang secara keseluruhan.

Hasilnya adalah tampilan yang lebih modest tanpa menambah banyak volume pakaian pada bagian tubuh. Ini penting terutama di negara beriklim panas seperti Indonesia, ketika tambahan satu lapis pakaian saja bisa membuat tubuh terasa lebih cepat gerah.

Fake Sleeve Cuff

Pilihan terakhir adalah fake sleeve cuff atau manset lengan lepas-pasang. Bentuknya menyerupai bagian ujung lengan kemeja, renda, atau manset yang dapat dikenakan di pergelangan tangan. Ketika dipadukan dengan sweater, cardigan rajut, atau outer, bagian manset yang sengaja dibiarkan menyembul akan menciptakan ilusi bahwa pengguna mengenakan kemeja di balik luaran. Detail kecil ini dapat mengubah keseluruhan tampilan. Sweater polos,

misalnya, bisa terlihat lebih rapi dan terstruktur hanya dengan tambahan manset putih atau model lace. Keunggulan lainnya adalah pengguna tidak perlu memakai kemeja lengkap. Lapisan hanya ditempatkan pada bagian yang memang ingin ditonjolkan.

Teknik fake layering menunjukkan bahwa tampil stylish tidak selalu membutuhkan banyak pakaian. Justru, permainan detail kecil dapat memberikan efek visual yang cukup besar.

Untuk cuaca panas, prinsipnya tetap sama: pilih material ringan, berikan ruang agar udara dapat bersirkulasi, dan hindari pakaian yang terlalu ketat. Los Angeles Times yang mengutip peneliti tekstil juga menekankan bahwa kemampuan pakaian untuk mengalirkan udara dipengaruhi oleh konstruksi kain, bukan hanya label seratnya. (far,jst/dya)



**BGN TARGETKAN
 72,46 JUTA PENERIMA
 MBG PADA 2027**

Target Penerima Manfaat

Total Penerima
72.464.886 orang

Peserta Didik
60.599.777 orang

Kelompok 3B*
11.865.109 orang

Rincian Anggaran

Pagu Anggaran BGN
Rp240,20 triliun

Efisiensi Banper
Rp30 triliun

Alokasi Banper MBG
Rp232,5 triliun

**(Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita)*



gangguan kesehatan para siswa belum dapat dipastikan.

Sebanyak 92 siswa sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Gembong. Enam di antaranya menjalani rawat inap, sedangkan 86 lainnya menjalani rawat jalan. Sebanyak 98 siswa juga tercatat mendapatkan penanganan di IGD RSUD Soewondo Pati, sementara 41 siswa mendapat perawatan di RS Mitra Bangsa.

Sebagai langkah sementara, kegiatan belajar mengajar di MTsN Gembong dan SMPN 1 Gembong dihentikan. Siswa dipulangkan. Sementara SPPG Gembong 1 ditutup sementara untuk evaluasi dan mitigasi.

Yang juga menjadi perhatian adalah waktu distribusi makanan. SMPN 1 Gembong biasanya menerima makanan sekitar pukul 09.30, tetapi pada Selasa makanan datang sekitar pukul 11.30. Di MTsN 3, makanan yang biasanya tiba sekitar pukul 11.20 baru diterima sekitar pukul 12.00. Namun, keterlambatan distribusi tersebut belum dapat disebut sebagai penyebab kasus Pati.

Kasus Pati menambah daftar panjang persoalan keamanan pangan MBG. Data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dalam rapat dengan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 September 2026 terdapat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang berkaitan dengan keracunan pangan MBG. Kejadian itu tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi. Angka tersebut merupakan data kumulatif sampai 2 September, bukan jumlah terbaru setelah kasus-kasus pada pekan ini.

Pada 1-3 September saja, sekitar 1.950 orang dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah. Kasus terjadi antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Salah satu yang terbesar terjadi di SMAN 1 Lasem, Rembang, dengan 752 siswa dan 25 guru terdampak. Di Sidoarjo, sekitar 730 orang juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Persoalan itu kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana jika masyarakat tidak lagi merasa aman menerima makanan tersebut?

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, mengatakan masyarakat mempunyai pilihan untuk menerima maupun menolak MBG.

"Ya (masyarakat memiliki hak untuk menolak). Kita menghormati semuanya, baik yang menerima maupun yang tidak menerima. Kita kembalikan itu kepada masyarakat," kata Farida Rabu (9/9/2026) sore.

Menurut Farida, pilihan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan orang tua dan peserta didik. Terlebih setelah muncul kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah, masyarakat memiliki alasan untuk mempertimbangkan kembali keamanan makanan yang diterima.

Sikap Ombudsman tersebut bukan berarti lembaga itu meminta program MBG dihentikan. Farida menegaskan bahwa penghentian program bukan kewenangan Ombudsman. Fokus lembaganya adalah memastikan pengawasan dan tata kelola pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau terkait dengan penghentian bukan ranahnya di kami. Kami di Ombudsman lebih fokus kepada pengawasan dan juga tata kelolanya," ujar Farida.

Ombudsman meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh dari hulu hingga hilir. Evaluasi itu mencakup standar kualitas makanan, penerimaan dan pengolahan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, proses distribusi, hingga batas waktu makanan dikonsumsi.

Persoalannya bukan hanya bagaimana makanan diproduksi, tetapi bagaimana memastikan makanan tetap aman ketika sampai di tangan penerima.

Farida juga meminta masyarakat melapor apabila menemukan dugaan adanya pihak yang memaksa sekolah atau penerima untuk tetap menerima MBG ketika mereka menyatakan keberatan.

"Kalau ada seperti itu laporkan saja," katanya.

Ombudsman membuka ruang pengaduan apabila terdapat dugaan kelalaian, maladministrasi, atau standar pelayanan yang tidak dijalankan. Terutama jika persoalan serupa terus muncul dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

"Apabila ditemukan dapur SPPG yang berulang kali mengalami permasalahan, harus ada tindakan korektif yang tegas. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan keselamatan peserta didik menjadi taruhannya," ujar Farida.

Persoalan keamanan makanan juga menyentuh sisi yang lebih sulit diukur yaitu kepercayaan.

Anggota MBG Watch, Galau D Muhammad, mengatakan sebagian siswa yang sebelumnya mengalami dugaan keracunan di Rembang bahkan mulai mempertimbangkan untuk membawa makanan dari rumah.

Pernyataan itu disampaikan setelah Galau dan tim melakukan pemantauan terhadap korban di SMAN 1 Lasem, Rembang, pada Jumat, 5 September 2026.

"Ke depannya gimana, apakah

adik-adik setelah pengalaman keracunan itu tidak diberikan MBG lagi? Sebagian menjawab kami lebih baik membawa bekal dari rumah," kata Galau.

Pilihan membawa bekal mungkin terlihat sederhana. Namun, di tengah program negara yang dirancang untuk menyediakan makanan bagi jutaan penerima, keputusan seorang anak untuk memilih makanan dari rumah karena merasa lebih aman menunjukkan bahwa persoalannya sudah bergeser dari sekadar menu dan kandungan gizi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyoroti persoalan tersebut sejak awal September. Dalam keterangan pers pada 4 September 2026, Komnas HAM mendesak kepolisian menyelidiki rangkaian kejadian dugaan keracunan pangan yang berkaitan dengan MBG dan meminta dapur yang diduga terkait kasus dihentikan sementara.

Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas pangan, terutama pangan yang aman dikonsumsi, merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam keterangan Komnas HAM yang diterbitkan pada September 2026, lembaga tersebut juga menyoroti berulangnya kejadian keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.

Dengan begitu, persoalan MBG tidak cukup diselesaikan dengan menghitung berapa banyak dapur yang ditutup atau berapa banyak makanan yang ditarik. Pemerintah perlu memastikan mengapa kesalahan serupa terus berulang.

Kepala BGN Sudaryono, dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada awal September 2026, mengatakan hasil evaluasi internal lembaganya menunjukkan sekitar 80-90 persen kasus keracunan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

BGN juga menyatakan telah memperketat pengawasan terhadap sekitar 27.000 pusat distribusi makanan. Sedikitnya 833 dapur dilaporkan telah ditutup karena tidak memenuhi standar hygiene dan sanitasi.

Namun, semakin banyak kasus yang muncul, semakin sulit persoalan tersebut dibaca sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut angka 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian sebagai persoalan yang perlu dilihat secara sistemik. Kritiknya bukan semata soal satu dapur, satu menu, atau satu petugas, melainkan desain pengawasan dan distribusi makanan dalam program yang cakupannya terus diperbesar. (wid,kcm,ist,rls/dya)

Pencarian Jurnalis di Sekitar Anak Krakatau Masih Nihil

KELUARGA MINTA PULAU SERTUNG DICEK

Pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, belum membuahkan hasil hingga hari kedua, Rabu (9/9/2026). Di tengah pencarian yang terkendala aktivitas vulkanik, keluarga korban meminta tim SAR tidak hanya menyisir perairan, tetapi juga memeriksa kemungkinan keberadaan rombongan di Pulau Sertung.



Desi Purnama, istri jurnalis ANTARA Bagus Khoirunnas, berdiskusi dengan Gubernur Banten Andra Soni saat berada di Pos SAR Nasional di Pantai Marina Carita, Pandeglang, Banten, Rabu (9/9/2026).ist

Permintaan itu disampaikan Desi Purnama, istri jurnalis ANTARA M. Bagus Khoirunnas, saat berada di Pos SAR Nasional Pantai Marina Carita, Pandeglang. Desi mengatakan ada informasi yang membuat keluarga menduga rombongan sempat berada di sekitar Pulau Sertung.

Menurut Desi, salah satu pemandu dalam rombongan, Heriyanto, sempat mengirim foto melalui grup aplikasi pesan pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 18.13 WIB. Foto tersebut memperlihatkan Gunung Anak Krakatau dengan asap putih mengepul. Dari posisi dalam foto, keluarga memperkirakan gambar itu diambil di sekitar Pulau Sertung.

Desi juga mengatakan suaminya sempat berbicara dengan rekannya mengenai kemungkinan turun di pulau tersebut. Pembicaraan itu, menurut dia, muncul setelah kondisi di sekitar Gunung Anak Krakatau dipertimbangkan.

"Sempat ngomong juga, 'Bisa nggak turun di Sertung?'" kata Desi kepada Gubernur Banten Andra Soni.

Desi kemudian mengutip jawaban salah satu rekannya yang disebut memberikan pertimbangan agar rombongan tidak memaksakan diri turun apabila kondisi tidak memungkinkan.

"Nah, Bang Yandi ini ngasih rekomendasi, 'Kalau memang nggak memungkinkan, nggak usah turun.'"

Tapi kan kita nggak tahu, Pak, mereka di sana kayak gimana. Mereka turun atau nggak, kita nggak tahu," ujarnya.

Karena itu, keluarga berharap Pulau Sertung ikut diperiksa apabila kondisi keselamatan memungkinkan. Namun, Desi mengaku mendapat informasi bahwa tim SAR belum dapat turun ke pulau tersebut.

"Tapi informasinya kan nggak bisa, Pak, turun di Sertung. Itu gimana, Pak? Nggak memungkinkan katanya," ucapnya.

Andra kemudian langsung meminta Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menindaklanjuti informasi tersebut. Amrad menjelaskan bahwa tim SAR sebelumnya baru mencapai bagian luar Pulau Rakata.

"Sampai ke situ (Rakata), Pak. Sampai ke situ, hanya karena pas kondisi itu sudah mau malam, terus anggota saya balik. Balik karena... karena memang kondisi angin kan masih, asap tebal," ujar Amrad.

Pulau Sertung merupakan salah satu pulau di kawasan Krakatau yang berada dalam radius bahaya. Bersama Pulau Rakata dan kawasan Krakatoa, lokasi tersebut masuk wilayah yang harus dihindari karena aktivitas Gunung Anak Krakatau masih tinggi. Polda Banten juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati gunung dalam radius tiga kilometer sesuai imbauan PVMBG.

Kondisi tersebut menjadi salah satu

alasan pencarian tidak bisa dilakukan secara leluasa. Tim SAR harus menghitung risiko bagi personel sebelum mendekati kawasan gunung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad sebelumnya mengatakan kondisi erupsi membuat tim tidak berani terlalu dekat dengan Gunung Anak Krakatau.

"Memang pada saat itu masih erupsi. Dan itu kan sudah ada memang peringatan. Paling tidak safety juga yang harus kita pikirkan," kata Amrad.

Keterbatasan juga terjadi dalam pencarian melalui udara. Keluarga sebelumnya berharap helikopter digunakan untuk memperluas pencarian. Namun, kondisi Gunung Anak Krakatau yang masih aktif dan abu vulkanik yang menyebar membuat penggunaan helikopter belum memungkinkan. Sebagai gantinya, tim

SAR menggunakan drone untuk membantu pencarian dari udara.

Pada hari kedua pencarian, Basarnas memperluas wilayah penyisiran dengan membagi personel ke sejumlah Search and Rescue Unit (SRU). Sejumlah kapal dan peralatan juga dikerahkan, termasuk KN SAR Tetuka, KAL Anyer, KP Sanjaya, sejumlah rigid inflatable boat, serta drone thermal.

Namun hingga pencarian hari kedua berakhir pada Rabu sore, belum ditemukan tanda keberadaan delapan orang tersebut. Basarnas menyatakan operasi akan dilanjutkan pada Kamis (10/9) sekitar pukul 07.00 WIB. Area pencarian juga berpotensi diperluas ke sisi utara Gunung Anak Krakatau dengan mempertimbangkan arus laut, pergeseran ombak, dan arah angin.

Delapan orang yang dicari berada dalam satu speedboat bernama Arupadhatu 1. Mereka berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Lima di antaranya merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhis dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donal yang merupakan jurnalis lepas. Tiga lainnya adalah Warta sebagai kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Heriyanto sebagai pemandu.

Komunikasi dengan rombongan diketahui terputus setelah mereka bergerak menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Polda Banten menyebut komunikasi terakhir terjadi sekitar pukul 14.42 WIB ketika salah satu anggota rombongan mengirimkan lokasi kepada rekannya. Sekitar pukul 15.04 WIB, rombongan tidak lagi dapat dihubungi. (gus,rls,kum,kcm/dya)

